

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JUAL BELI JAM TANGAN *ORIGINAL BLACK
MARKET* DI RAJA JAM SURABAYA**

SKRIPSI

OLEH

DICKY JANATAN SYAHBANA

NIM. C72214037



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Dicky Janatan Syabbana
NIM : C72214037
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Terhadap Jual Beli Jam Tangan *Original Black
Market* di Raja Jam Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Dicky Janatan Syabbana

C72214037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya” yang ditulis oleh Dicky Janatan Syahbana NIM C72214037 telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing dan siap untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Desember 2020

Pembimbing



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 1971102120011221002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dicky Janatan Syahbana NIM. C72214037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. Nurlailatul Masyafaah, Lc, M. Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji III

Suyikno, S Ag., MH.

NIP. 197307052011011001

Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si.

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DICKY JANATAN SYAHBANA
NIM : C72214037
Fakultas/Jurusan: SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : dickyjanatansyahbana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI JAM TANGAN ORIGINAL

BLACK MARKET DI RAJA JAM SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 JUNI 2021

Penulis

(DICKY JANATAN SYAHBANA)
nama terang dan tanda tangan

Black market adalah pasar gelap biasa disebut barang *reject*, barang selundupan. Pasar gelap seolah menjadi polemik dalam dunia perdagangan di Indonesia, selain terbebasnya dari pajak *black market* seolah permasalahan yang takkan pernah ada ujungnya di Indonesia. Adapun penelitian dari status jual beli jam tangan *Original Black Market* “sah” menurut Islam tetapi jam tangan *Original Black Market* “tidak sah” secara undang-undang.

Seiring perkembangan zaman dan maraknya pasar gelap yang sangat bombastis dan seolah tanpa celah untuk menghentikan ekspor dan impor bisa dikatakan kacau hingga membuat para pelaku jual beli dengan cara *black market* semakin sering terjadi dan seolah akan menjadi suatu pundi kekayaan yang bersih bagi para penjual, selain memberikan harga yang miring peredaran barang secara *illegal*. Menjadi suatu bentuk kerugian pada negara.

Demi menciptakan perkembangan pasar di Indonesia dan mewujudkan negara yang bersih dari penyelundupan barang *illegal* atau *black market*. Pemerintah membuat Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen terhadap para distributor nakal yang menjual produk dengan status *original black market* yang notabene 1:1 dengan merek atau produk yang dipasarkan oleh toko resmi, perbedaaan bisa dikatakan dari segi garansi atau kualitas barang.

Walaupun kualitas suatu barang telah dijelaskan kepada konsumen, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap suatu keinginan individu konsumen, tak hayal para konsumen tetap memilih barang yang notabene *illegal* untuk diperjual

jual beli belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pedagang. Hal ini terdapat karena hak-hak konsumen yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pedagang.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Dyna Thursina mahasiswi program studi Muammalah pada tahun 2010. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Handphone *Black Market* di Kharisma Cell Jombang” pokok pembahasan skripsi ini menyatakan dalam mekanisme penjual handphone *black market* tidak di jual secara umum. Akibat yang ditimbulkan memudahkan distributor menggelapkan produknya lebih banyak lagi. Analisis hukum Islam bahwa jual beli tersebut dilakukan secara sah karena telah memenuhi syarat sah dan di haramkan secara negara karena menimbulkan kerugian pada negara melalui sektor perpajakan.¹³

Telah banyak skripsi yang membahas terkait jual beli *black market*. Namun hal ini akan menjadi berdeda dengan dengan skripsi yang dibahas penulis, karena penulis nantinya akan lebih fokus terhadap mekanisme, akad jual beli dan cara distributor mendapatkan barang baru *Original black market* dan menjualnya dengan adanya sedekah dan secara terang-terangan seolah menjual barang tersebut seperti barang resmi di pasaran dan memberikan telaah terhadap

¹² Yoshida Lola Tama “*Black Market hsnphone bekas dalam perspektif hukum perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam*” (skripsi-IAIN Tulungagung 2018)

¹³ Dyna Thursina “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli handphone Black Market di Kharisma Cell Jombang*”, (skripsi-IAIN Sunan Ampel 2010)

dengan teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi terdiri dari lima bab secara sistematis seperti berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua merupakan landasan teori , pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori yang meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Jual Beli, Jual Beli yang dilarang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga, pada ini membahas tentang data penelitian yang dimana mencakup sejarah berdirinya “Raja Jam surabaya”, lokasi toko, praktik jual beli, perbandingan nominal harga, perbandingan kualitas produk.

Bab keempat, membahas tentang analisis jual beli baik secara hukum Islam dan perlindungan konsumen, akad dalam jual beli, objek jual beli.

Bab kelima, ini merupakan akhir penulisan yang dimana berisi suatu kesimpulan dan saran.

kepentingan sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak diperdagangkan.

Dalam pandangan Islam, para ahli fiqih terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum islam mengemukakan tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen secara khusus. Hanya saja sumber hukum islam mengemukakan tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen, sehingga muncul definisi konsumen menurut islam yang membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Menurut M. Abdul Mannan mengemukakan bahwa masyarakat islam hanya dituntun secara ketat dengan sederetan larangan (yakni: memakan daging babi, minuman keras, menggunakan pakaian sutera dan cincin emas untuk kaum pria, dan seterusnya). Dalam hal ini pendapat M. Abdul Mannan bukanlah definisi dari konsumen, melainkan hanya menggambarkan secara sederhana mengenai perilaku yang harus dipatuhi.

Bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus halal, baik, dan aman. Oleh karena itu pentingnya produsen melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuan dari

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.

Hak yang diberikan kepada konsumen berupa keamanan, kenyamanan dan keselamatan. sehingga konsumen dengan leluasa dalam hal memilih dan mendapatkan barang dsesuai dengan nilai tukar. Sehubungan dengan informasi barang, kondisi barang dan jaminan dari barang konsumen berhak mengetahui secara jujur dan jelas, agar tak menimbulkan suatu keluhan jikalau keluhan itu timbul, maka konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya. Demi menjaga konsumen dari

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang diisyaratkan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

Hal yang menunjang perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang beriktikad melakukan bentuj kecurangan pada predaran produk yang tak layak menurut Undang-Undang perlindungan konsumen. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

1. Melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar dan/ atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga. Harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru;
 - c. Barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai seponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Baarang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain;

bagi pelaku usaha merupakan suatu hal yang wajar karena sistem kenyamanan yang adil. Didalam undang-undang perlindungan konsumen ada kemungkinan konsumen meminta tanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kemungkinan konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

3	Sumar	Pembeli pada awalnya tidak mengetahui kualitas barang, namun penjual menjelaskan kualitas barang, sehingga pembelipun menyanggupi apabila terjadi kerusakan dikemudian hari, meskipun garansi barang pendek namun faktor keinginan memiliki adalah sifat alamiah manusia	Di berikan informasi yang jujur serta kerelaan menghadapi resiko.
---	-------	--	---



- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Cetakan 1 Febi UIN-SU Press 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Thursina, Dyna, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli handphone Black Market di Kharisma Cell Jombang*", skripsi-IAIN Sunan Ampel 2010
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- UU No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, www.hukumonline.com/pusatdata, diakses pada 18 Maret 2020
- Wardiono, Kalik, *Hukum Perlindungan Konsumen* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013